

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman yang modern ini pendidikan dan pendampingan sedari dini pada anak-anak tentang pentingnya menjaga diri dari orang yang belum dikenal akan berdampak besar pada perkembangan psikologis sang anak saat dewasa nanti. Semakin beragamnya motif kejahatan tidak hanya dapat menjerat anak namun juga orang dewasa terutama wanita.

Hingga saat ini, kejahatan terutama terhadap kaum wanita semakin marak terjadi, kasus pelecehan seksual terutama pemerkosaan yang dialami oleh kaum wanita terus meningkat. Dalam catatan tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada tahun 2017, kekerasan di ranah komunitas mencapai angka 3.092 kasus (22%), di mana kekerasan seksual menempati peringkat pertama sebanyak 2.290 kasus (74%), diikuti kekerasan fisik 490 kasus (16%) dan kekerasan lain di bawah angka 10%; yaitu kekerasan psikis 83 kasus (3%), buruh migran 90 kasus (3%); dan trafiking 139 kasus (4%). Jenis kekerasan yang paling banyak pada kekerasan seksual di ranah komunitas adalah perkosaan (1.036 kasus) dan pencabulan (838 kasus).¹

¹Komisi Nasional Perempuan, 2017, *Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017*, Jakarta, 7 Maret 2017, <https://www.komnasperempuan.go.id/lembar-fakta-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-tahun-2017-labirin-kekerasan-terhadap-perempuan-dari-gang-rape-hingga-femicide-alarm-bagi-negara-untuk-bertindak-tepat-jakarta-7-maret-2017/>, diunduh 3 Mei 2017

Saat ini lebih dari 90 persen kasus pemerkosaan di Indonesia tidak dilaporkan ke pihak berwajib. Alasan utama mereka tidak berbicara adalah karena stigma sosial dan para korban takut disalahkan.²

Kekerasan seksual pada umumnya diartikan sebagai bentuk kejahatan yang menyerang kehormatan seksual seseorang. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, baik secara langsung (fisik) maupun secara tidak langsung (psikis). Saat ini, pengaturan mengenai kekerasan seksual di Indonesia dapat ditemukan di beberapa pengaturan baik di tingkat nasional maupun daerah.³ Semakin maraknya kasus pemerkosaan ini juga semakin bermacam-macam pula korbannya seperti kaum penyandang disabilitas atau difabel.

Isu tentang penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah “difable” (differently abled people) adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari Pemerintah maupun masyarakat. Khususnya di Negara berkembang seperti Indonesia, terabaikannya masalah “difable” ini disebabkan oleh adanya faktor sosial budaya, selain faktor ekonomi dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak komunitas difable. CRPD yaitu konvensi tentang Hak-hak Difabel/ Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. CRPD menetapkan hak-hak penyandang

²<https://www.voaindonesia.com>, diakses 3 Mei 2017

³*Assesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*, 2016, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Hlm 56

secara luas yaitu setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain.⁴

Diskriminasi dan kekerasan seksual pada penyandang disabilitas perempuan semakin muncul ke permukaan, karena mulai menggeliatnya upaya untuk memasukkan layanan disabilitas pada lembaga-lembaga layanan. Kekerasan seksual pada perempuan dengan disabilitas terjadi karena asumsi bahwa disabilitas adalah makhluk a-seksual atau menstigma bahwa disabilitas (terutama disabilitas intelektual) memiliki kebutuhan seksual yang berlebih, sehingga melanggengkan praktek kekerasan seksual yang terjadi pada mereka.⁵

Perlunya perlindungan hukum sangat dibutuhkan terutama pada korban kekerasan seksual, bukan hanya terhadap korban berfisik normal tetapi juga terhadap korban dengan kondisi penyandang difabel atau disabilitas. Menurut Undang-undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bahwa dalam Pasal 1 pengertian penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan

⁴ Rahayu Repindowaty Harahap, Bustanuddin, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Crpd)*, Volume VIII Nomor I Januari 2015, hlm 17.

⁵ Komisi Nasional Perempuan, 2017, *Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017*, Jakarta, 7 Maret 2017, <https://www.komnasperempuan.go.id/lembar-fakta-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-tahun-2017-labirin-kekerasan-terhadap-perempuan-dari-gang-rape-hingga-femicide-alarm-bagi-negara-untuk-bertindak-tepat-jakarta-7-maret-2017/>, diunduh 3 Mei 2017

untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Di dalam konvensi Hak-hak penyandang disabilitas CPRD (*convention of the rights of person with disabilities*) Pasal 5 menerangkan bahwa “Negara menjamin kesetaraan perlindungan hukum bagi setiap orang dan melarang segala bentuk diskriminasi atas difabilitas”.⁶ Dengan adanya pengertian tersebut dapat diartikan bahwa jaminan kesetaraan diberikan oleh negara sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sehingga tidak terjadi diskriminalitas. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285 menyebutkan:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Dengan adanya undang-undang tersebut adalah bukti bahwa negara melindungi setiap orang tanpa terkecuali yang mendapatkan tindakan asusila dengan memberikan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual.

Mengenai kasus pemerkosaan yang terjadi di masyarakat tentu sangat menjadi sorotan publik ketika yang menjadi korban terhadap tindakan tersebut adalah penyandang difabel terutama mengenai pemberian sanksi terhadap pelaku, berbeda dengan pemberian sanksi terhadap pelaku pemerkosaan dengan korban bukan penyandang difabel.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut kedalam

⁶Kajian dan Mekanisme Perlindungannya, 2012, PUSHAM UII, Yogyakarta.

penulisan skripsi dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DENGAN KORBAN DIFABEL DAN BUKAN DIFABEL”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pidana terhadap kekerasan seksual dengan korban difabel dan bukan difabel dalam hukum positif ?
2. Bagaimanakah kekerasan seksual dilihat dari perspektif jenis delik ?
3. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual dengan korban difabel dan bukan difabel dalam putusan hakim ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah yang sudah dijelaskan maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap kekerasan seksual dengan korban difabel dan bukan difabel dalam hukum positif.
2. Untuk mengetahui kekerasan seksual dilihat dari perspektif jenis delik.
3. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual dengan korban difabel dan bukan difabel dalam putusan hakim.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka diharapkan penulisan ini dapat memberikan kegunaan serta manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan bagi kalangan akademisi hukum, yaitu :

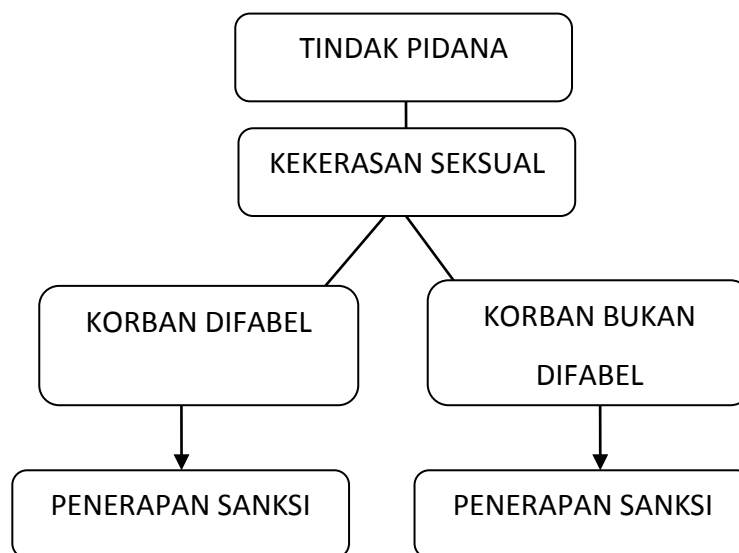
1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum terutama untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan serta sumbangan pemikiran terhadap pemerintah khususnya bagi aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan keadilan dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

D. Kerangka Pemikiran



Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Pelaku tindak pidana dapat dikatakan sebagai subyek tindak pidana. Simons, seorang ahli hukum Belanda mendefinisikan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan itu.⁷ Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana adalah apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Kerugian itu dapat bersifat materi, immateril, ataupun campuran dari materiil dan immateril.

Kekerasan seksual adalah perbuatan yang merugikan secara campuran yang sangat merugikan bagi korban baik secara lahiriah ataupun rohaniah. Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan tentu dapat diperhitungkan melihat kerugian yang dialami oleh korban. Semakin kesini, korban tindak pidana kekerasan seksual dapat dialami oleh wanita dari usia muda hingga lansia ataupun penyandang difabel. Bagi penyandang difabel tentu untuk melaporkan tindak pidana kekerasan seksual tersebut sangat sulit dilihat dari berbagai hal seperti adanya ancaman oleh pelaku tindak pidana serta ketidakmampuan bagi korban untuk melapor karena keterbatasan fisik.

Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) jika dikaji berdasarkan pada perspektif kriminologi, menunjuk pada motif dan perilaku, dimana hal tersebut

⁷Topo Santoso, 2001, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernita*, Bandung; Asy Samil, hlm 132

memiliki motif pemuasan nafsu seksual. Pengaturan mengenai kejahatan di Indonesia diatur dalam peraturan yang telah dikodifikasi yaitu KUHP. Terdapat dua jenis tindak pidana perkosaan dalam KUHP, yaitu : 1. Pasal 285 diatur mengenai tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh 2. Pasal 289 mengatur mengenai tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul. Dalam Pasal 285 KUHP tidak ditegaskan apa yang menjadi unsur kesalahan, baik itu sengaja atau alpa. Namun dengan dicantumkannya unsur memaksa dalam rumusan pasalnya, maka jelas bahwa perkosaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Dapat dikatakan tindakan perkosaan apabila telah terjadi persetubuhan antara pelaku dan korban. Apabila tidak sampai terjadi persetubuhan maka perbuatan dimaksud dapat dikualifikasikan dengan tindak pidana percobaan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285 Jo. Pasal 53 KUHP) dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul (Pasal 289 KUHP). Dari ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana perkosaan tersebut, dirumuskan pula suatu sanksi pidana yang diberikan bagi pelaku kejahatan. Dalam ketentuan Pasal 285 KUHP dinyatakan bahwa ancaman pidana maksimum yang diterima oleh pelaku adalah duabelas tahun penjara. Sanksi minimalnya tidak ada, sehingga memungkinkan pelaku dijerat dengan hukuman yang lebih ringan jauh dari efek yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya terhadap korban kejahatan kekerasan seksual (perkosaan).⁸

⁸ Ni Made Dwi Kristiani, 2014 , *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*, Vol.7 No.3 2014, hlm 379.

Secara umum, tujuan hukum pidana adalah menciptakan ketertiban, keadilan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan jalan mencegah, melindungi kepentingan-kepentingan hukum baik kepentingan orang-perorangan atau individu, kepentingan masyarakat atau kolektivitas serta kepentingan negara atau pemerintah, dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya.⁹ Pemidanaan serta pemberian sanksi diberikan kepada pelaku tindak kejahatan bertujuan sebagai upaya untuk memberikan rasa keadilan bagi korban.

E. Metode penelitian

1. Metode pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan normatif, di mana melakukan analisis putusan hakim dalam perspektif Hukum Positif

2. Jenis Penelitian

Pada prinsipnya penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif bersifat diskriptif.¹⁰

⁹Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta; Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm.314.

¹⁰Sudarwan Danim, 2002, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, Bandung, CV. Pustaka Setia, , Cet. Ke-1, hlm.51.

Penelitian ini akan menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisa permasalahan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual.

3. Bentuk dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder¹¹ yang terdiri dari bahan-bahan hukum, sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, UU No.23/2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan, UU No.31/2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan putusan Pengadilan Nomor : 48/Pid.B/2010/PN.Glt , Putusan Nomor: 410/Pid.B/2014/PN.Bgl, Putusan Nomor: 33/Pid.B/2012/PN.SS.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk membantu memperjelas arti kata dalam penelitian ini yaitu kamus hukum, internet dan lain-lain.

¹¹ Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah Studi Kepustakaan yaitu penelitian terhadap masalah hukum yang semata-mata ditujukan terhadap data kepustakaan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder lain.

5. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan data dengan menekankan pada pengambilan kesimpulan dari putusan hakim tentang kasus pemerkosaan dengan korban difabel dan bukan difabel. Seluruh data yang diperoleh diklasifikasikan dari bentuk yang bersifat umum kemudian dikaji dan diteliti selanjutnya ditarik kesimpulan yang mampu memberikan gambaran spesifik dan relevan mengenai data tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah pemahaman isi dari penulisan maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang tindak pidana kekerasan seksual, pemidanaan dan penerapan sanksi pidana, tinjauan umum tentang korban.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas antara lain: pengaturan hukum pidana terhadap kekerasan seksual dengan korban difabel dan bukan difabel dalam hukum positif, kekerasan seksual dilihat dari perspektif jenis delik, mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual dengan korban difabel dan bukan difabel dalam putusan hakim.

BAB IV Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.